

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas dua hal, yang pertama yaitu gambaran umum tentang Kabupaten Kulon Progo dan yang kedua adalah gambaran umum tentang PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo. Kedua hal tersebut akan dibahas lebih lanjut lagi.

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

Secara geografis Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ} 38'42'' - 7^{\circ} 59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 1'37'' - 110^{\circ} 16'26''$ Bujur Timur, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
2. Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta
3. Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
4. Selatan : Samudera Hindia

Secara fisiografis, terdapat Sungai Progo disisi timur Kabupaten Kulon Progo yang memisahkan antar kabupaten yaitu antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sungai Progo adalah salah satu sungai terbesar yang melintasi Provinsi DIY dengan hulu yang ada di Gunung Sumbing Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan bermuara di Samudera Hindia. Sungai Progo memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian bagi penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berada disekitar aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pembudidayaan disektor pertanian.

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir

Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah. Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan

keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Luas area kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,512 ha (586,28 km²) yang meliputi 12 kecamatan dengan 87 desa, 1 kelurahan dan 918 pedukuhan. Kecamatan terluas adalah Samigaluh dan Kokap, masing-masing yaitu 12% dari total wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Wates. Dari luas total kabupaten, 24,89 % berada di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur, 38,16 % di wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36,97 % di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Terdapat 1.885 Rukun warga dan 4.469 Rukun Tetangga.

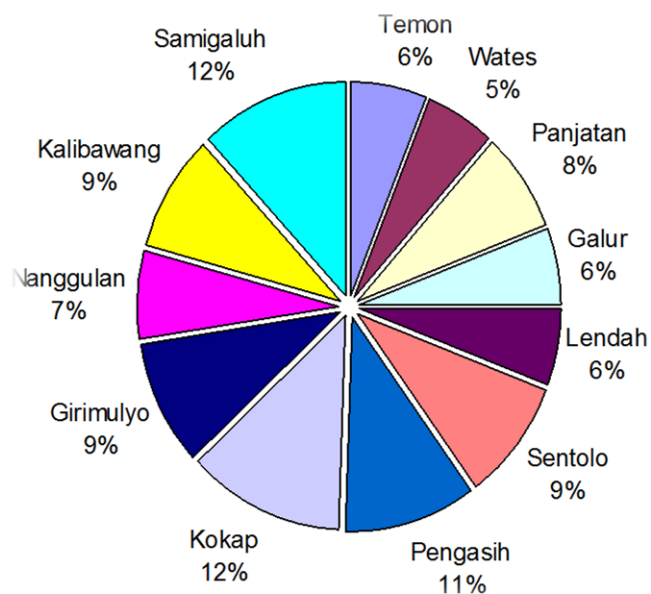
Tabel 1.1 Luas dan Persentase Luas Wilayah dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo (Hektar), 2013.

Kecamatan	Jumlah desa/Kelurahan	Luas Kecamatan	
		(Ha)	(%)
Temon	15	3.629,890	6,19
Wates	8	3.200,239	5,46
Panjatan	11	4.459,230	7,61
Galur	7	3.291,232	5,61
Lendah	6	3.559,192	6,07
Sentolo	8	5.265,340	8,98
Pengasih	7	6.166,468	10,52
Kokap	5	7.379,950	12,59

Girimulyo	4	5.490,424	9,36
Nanggulan	6	3.960,670	6,76
Kalibawang	4	5.296,368	9,03
Samigaluh	7	6.929,308	11,82
Total	87	58.627,512	100,00

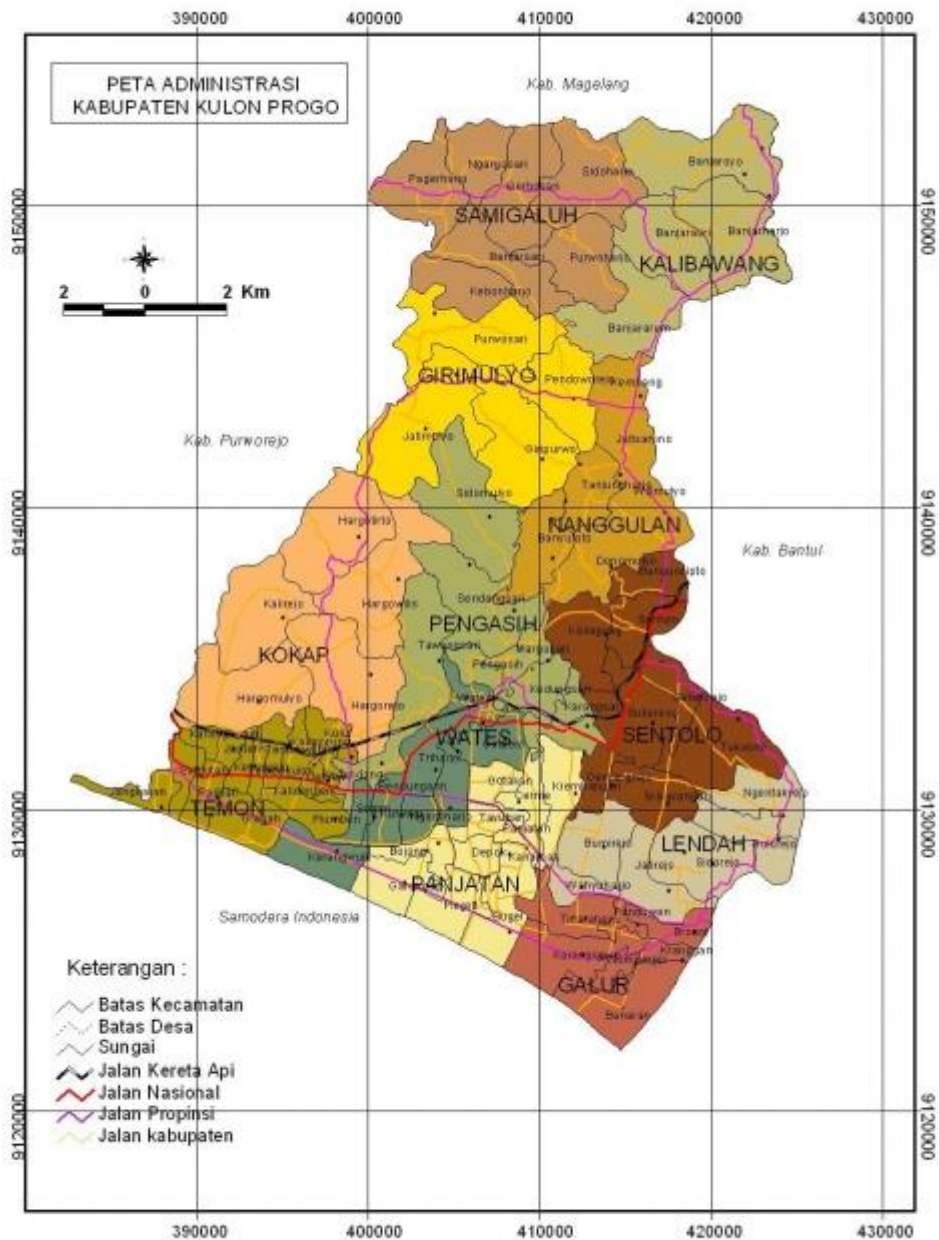
Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo Source : BPS – Statistics of Kulon Progo Regency Catatan/Note : Tidak ada perubahan sejak tahun 2000/Unchanged since 2000

Tabel 1.2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo Menurut Kecamatan



Sumber: Geografis dan Iklim Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014

Tabel 1.3 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



*Sumber: Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo
(<http://www.kulonprogokab.go.id>)*

Secara ekonomi, pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 5,05 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Kontribusi sektor ini sebesar 22,87% diikuti sektor jasa-jasa

sebesar 22,64% dan di posisi ketiga yakni sektor perdagangan-hotel-restoran dengan kontribusi sebesar 17,27%. Sektor dengan kontribusi terkecil yakni sektor listrik, gas, dan air bersih dengan sumbangan kontribusinya sebesar 0,86%.

1. Demografi / Kependudukan dan Tenaga Kerjaan

1.1. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, dibandingkan dengan tahun 1980, penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2010 bertambah 8.814 jiwa. Beberapa indikator kependudukan berdasar Sensus Penduduk 1980-2010 di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sensus Penduduk 1980-2010 di Kabupaten Kulon Progo

Sensus Penduduk	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²
	Laki-laki	Perempuan			
1980	185.232	195.453	380.685	95	649
1990	182.344	189.965	372.309	96	635
2000	182.672	188.272	370.944	97	633
2010	190.694	198.175	388.869	96	663

Sumber: Penduduk dan Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014

Di Kabupaten Kulon Progo, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2010, mayoritas penduduk berada di Kecamatan Pengasih 11,62%, Kecamatan Sentolo 11,45%, dan Kecamatan Wates 11,31%, sedangkan 9 kecamatan lainnya memiliki jumlah penduduk kurang dari 10%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur hampir merata di setiap level kelompok umur. Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia muda (0-14) tahun sebanyak 89.691 jiwa (23,06 persen), penduduk usia produktif (15-49) tahun sebanyak 251.870 jiwa (64,77 persen), dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 47.308 jiwa

(12,17 persen). Angka beban ketergantungan penduduk usia produktif sebesar 54, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 54 penduduk usia tidak produktif.

Penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 tercatat sebanyak 370.944 jiwa, laju pertumbuhan -0,04, rasio jenis kelamin sebesar 97 dan kepadatan penduduknya mencapai 633 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 388.869 jiwa, laju pertumbuhan 0,48, rasio jenis kelamin sebesar 96 dan kepadatan penduduknya mencapai 663 jiwa per km².

Tabel 2.2 Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo dirinci menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Temon	11.993	12.478	24.471
2. Wates	21.571	22.424	43.995
3. Panjatan	16.281	17.116	33.397
4. Galur	14.408	14.712	29.120
5. Lendah	18.113	18.334	36.447
6. Sentolo	22.054	22.471	44.525
7. Pengasih	21.961	23.214	45.175
8. Kokap	15.346	15.778	31.124
9. Girimulyo	10.694	11.199	21.893
10. Nanggulan	13.197	14.042	27.239
11. Kalibawang	12.948	13.854	26.802
12. Samigaluh	12.128	12.553	24.681
Jumlah/Total	190.694	198.175	388.869

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo
 Source : BPS-Statistics of Kulon Progo Regency
 Catatan/Note : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

1.2. Tenaga Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Sulitnya memperoleh lapangan kerja pada sektor formal membuat persaingan pencari kerja semakin ketat. Untuk itu perlu peran pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk membantu menciptakan lapangan kerja baru yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Tabel 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Pengangguran Terbuka Tahun 2007-2015 Kabupaten Kulon Progo

**TPAK DAN TPT MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007-2014**

TAHUN	TPAK			TPT		
	L	P	LP	L	P	LP
2007	83,0	60,1	70,8	3,6	5,2	4,3
2008	81,5	63,5	72,1	2,9	4,3	3,6
2009	84,4	62,9	73,3	4,4	4,2	4,3
2010	82,1	65,4	73,5	4,2	4,2	4,2
2011	85,38	65,64	75,17	4,19	1,64	3,03
2012	83,52	67,82	75,40	3,28	2,76	3,04
2013	86,25	65,66	75,61	3,79	1,69	2,85
2014	87,32	67,97	77,34	3,17	2,52	2,88

Sumber: Sakernas Agustus 2007-2014

1.3. Tingkat Pendidikan

Beberapa program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu dasar sumber daya manusia sejak usia dini, dan pendidikan dasar 9 tahun. Untuk melihat keberhasilan program pemerintah dan peningkatan pembangunan manusia dapat dilihat dari data-data pendidikan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi penentu kebijakan.

Kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat melalui ketersediaan fasilitas pendidikan masyarakat. Jumlah sekolah untuk tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan untuk menampung seluruh penduduk usia pendidikan dasar. Selama tahun 2006 hingga tahun 2010, tingkat ketersediaan sekolah maupun penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar mengalami peningkatan. Hal tersebut mengartikan bahwa beban sebuah sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah akan lebih ringan dan dapat membuktikan adanya perbaikan layanan pendidikan.

Sedangkan tingkat ketersediaan sekolah maupun penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK dan sederajat mengalami peningkatan juga, yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dalam layanan pendidikan, di mana adanya peningkatan jumlah sekolah yang bisa untuk menampung penduduk usia sekolah.

Tabel 2.4 Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2012-2013.

Jumlah Sekolah dan Murid menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan (Negeri & Swasta), 2012/2013

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK	
	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
Temon	26	2 502	5	1 403	1	303	5	1 426
Wates	41	5 458	12	3 449	5	1 212	9	3 508
Panjatan	30	2 881	4	1 105	0	0	1	412
Galur	27	2 937	6	1 584	3	374	2	111
Lendah	32	3 026	4	1 225	1	463	2	477
Sentolo	32	3 875	7	1 846	1	473	4	506
Pengasih	36	3 560	5	1 640	2	950	3	2 443
Kokap	41	2 635	5	950	1	147	1	100
Girimulyo	21	1 670	6	1 208	1	28	1	190
Nanggulan	27	2 374	7	1 233	1	64	3	1 558
Kalibawang	25	2 623	7	1 331	2	441	2	450
Samigaluh	32	2 206	8	1 118	1	102	3	550
Jumlah	370	35 747	76	18 092	19	4 557	36	11 731

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

2. Kondisi Politik Kabupaten Kulon Progo Pada Pemilu 2014

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kulon Progo, sering terjadi gesekan – gesekan politik yang mewarnai pelaksanaan Pemilu khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Seperti **konflik horisontal antar pendukung partai politik peserta Pemilu 2014, terkait pemasangan alat peraga kampanye terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Tiga kecamatan tersebut adalah Girimulyo, Nanggulan dan Pengasih. Di tiga kecamatan tersebut terjadi aksi saling cabut alat peraga kampanye antar pendukung dan simpatisan partai politik (parpol). Panwaslu Kulon Progo banyak menerima pesan singkat (SMS) dari caleg atau pengurus parpol yang menyatakan APK-nya dicabut simpatisan lain. Menurut Pujarasa sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, di kabupaten maupun**

kota lain bendera, spanduk dan baliho antar caleg berdampingan tanpa ada masalah. Caleg yang benderanya dicabut simpatisan caleg lain menerima, tapi bagi Panwaslu Kulon Progo perlu adanya upaya-upaya pencegahan jangan sampai menjadi embrio konflik yang akan berujung pada masalah dalam pelaksanaan pemilu di Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendukung kebijakan Pemerintah DIY membersihkan sampah visual. Termasuk APK milik caleg dan parpol peserta Pemilu 2014. Banyak parpol dan caleg berlomba-lomba membuat APK untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Menurut beliau kondisi politik menjelang pemilu ini, semakin memanas, khususnya pendukung parpol dan caleg. Hal ini perlu diantisipasi sejak awal, untuk meminimalisir konflik menjelang kampanye terbuka. Di beberapa titik terdapat APK yang dirobek, diambil dan dicabut. Sehingga suhu politik di Kulon Progo sudah semakin meamanas. Kecamatan yang menjadi pusat perhatian diluar pemetaan awal.

Selain itu, dengan adanya rencana Megaproyek Bandara di Kabupaten Kulon Progo juga menjadi celah terjadinya konflik. Tingkat partisipasi masyarakat terutama di daerah – daerah yang terdampak bandara cukup rendah. Seperti di Di TPS 2 Pedukuhan Kretek Desa Glagah dari 393 DPT hanya sekitar 150 orang yang datang untuk memilih. Selain itu, tingkat partisipasi yang rendah juga terjadi di TPS lain, di TPS 1 Bapangan Glagah dari DPT 321 pemilih dan tambahan 1 pemilih, ada 213 orang yang hadir. Di TPS 3 Kragon, Palihan, dari total DPT 280 yang hadir ada 215 pemilih dengan 200 suara sah. Di TPS 2 Selong, Palihan dari DPT 344 yang hadir mencapai 273 pemilih.

Berikut ini adalah hasil perolehan suara pada saat Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014.

Tabel 3.1 Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2014 Dapil 1

No	Partai	Rincian			Jumlah Akhir
	Rincian Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon	Temon	Wates	Panjatan	
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDI Perjuangan	472	1174	690	2336
1.	Akhid Nuryati	912	1887	700	3499
2.	Aji Pangaribawa, ST.	141	1622	1200	2963
3.	Beko Warsito	26	29	29	84
4.	Edi Priyono, S. Ip	58	262	2950	3270
5.	Aris Syarifudin	269	2378	631	3278
6.	Subaryati	10	29	55	94
7.	Dwi Ananda, SE.	115	369	1480	1964
8.	Wadiyo, SE.	84	1711	117	1912
9.	Woro Hidayati	841	1175	384	2400
10.	R. Agus Sutikno, SE.	254	43	112	409
11.	Hendarti Handayani	12	39	9	60
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3194	10718	8357	22269

Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.2 Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2014 Dapil 2

No	Partai	Rincian			Jumlah Akhir
	Rincian Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon	Pengasih	Kokap		
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDI Perjuangan	1025	898		1923
1.	Agustinus Widya Setyawan	808	672		1480
2.	Mursiti	155	127		282
3.	Sugiyanto, ST, MM.	133	1945		2078
4.	Endang Tri Kestingrum	80	182		262
5.	Djoko Purwanto	1075	101		1176
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3276	3925		7201

Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.3 Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2014 Dapil 3

No	Partai	Rincian			Jumlah Akhir
	Rincian Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon	Girimulyo	Samigaluh	Kalibawang	
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDI Perjuangan	398	420	589	1407
1.	Istana, SH.	476	197	218	891
2.	B. Wiwin Windarto	201	343	2386	2930
3.	Dra. Keksi Wuryaningsih	1225	2128	382	3735
4.	Yuliana Rosari Tri Suharyanti, SE.	56	74	59	189
5.	Maria Sulistyaningsih, SH.	38	41	50	129
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2394	3202	3684	9281

Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.4 Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2014 Dapil 4

No	Partai	Rincian			Jumlah Akhir
	Rincian Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon	Sentolo	Nanggulan		
	Nomor>Nama Partai dan Calon				
	PDI Perjuangan	1231	423		1654
1.	Heriyanto	1491	96		1587
2.	Th. Tjatur Nugroho, SE.	355	1052		1407
3.	Surtini	47	145		192
4.	Yuliantoro, SE.	2753	274		3027
5.	Hendrastuti	62	65		127
6.	Sumarsono, S. Ip.	526	29		555
7.	Irma Prihantari, SH.I	64	15		79
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	6529	2099		8628

Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo

B. Gambaran Umum PDI Perjuangan

a. Sejarah PDI Perjuangan

PDIP lahir dari pertarungan untuk sintas (*survive*) dan perlawanan terhadap pemaksaan kehendak negara terhadap kehidupan partai pada masa menjelang keruntuhan Orde Baru. Orde baru dengan berbagai cara berusaha menghalang-halangi tampilnya keturunan Soekarno, dalam hal ini Megawati, untuk tampil memimpin PDI karena dianggap membahayakan penguasa. Konflik berkepanjangan sejak tahun 1993-1999. Mengakibatkan PDI akhirnya pecah, satu pihak dibawah kepemimpinan Megawati yang didukung oleh pihak lain dibawah kepemimpinan Suryadi yang didukung Orde Baru.

Legitimasi kedua kubu PDI ini diuji dalam pemilu 1997. Pada pemilu tersebut, PDI kubu suryadi menadi peserta pemilu bersama PPP dan Partai Golongan Karya (Golkar). Sementara itu, PDI dibawah Megawati mengambil sikap boikot pemilu. PDI kubu Megawati memilih golput atau melakukan aliansi strategis dengan PPP yang dikenal dengan aliansi 'Mega-Bintang'. Perolehan suara PDI turun drastis dari 14,89 persen (1992) menjadi 3,06 persen (1997). Tajamnya perolehan suara PDI menjadi bukti legitimasi kepemimpinan PDI dibawah Megawati.

Setelah Orde Baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999 kemudian menjadi bukti untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang sesungguhnya. Legitimasi rakyat terhadap kepemimpinan PDI ternyata diberikan kepada PDI dibawah Megawati yang telah berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Ditengah pluralitas partai politik yang ikut pemilu 1999, PDIP tidak hanya mengalahkan PDI Orde Baru tetapi juga mampu keluar sebagai pemenang pemilu. Hasil pemilunya sangat prestisius, yaitu 33,7

persen. Diduga, pencapaian yang diraih oleh PDIP dalam pemilu itu tidak akan mampu diulang dalam sejarah pemilu-pemilu berikutnya, bahkan oleh partai-partai yang lain. Sedangkan PDI bentukan Orde Baru, yang saat itu dibawah Budi Hardjono, menjadi partai decimal, yaitu perolehan suaranya tidak mencapai 1 persen. Dengan demikian resistensi pendukung PDI dibawah kepemimpinan Megawati telah melahirkan PDI Perjuangan.

Pada tanggal 14 Februari 1999, Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan. PDIP merepresentasikan ideologi politik nasionalis-kerakyatan. Pada masa Orde Baru, PDIP bersama dengan PPP sekedar menjadi partai pelengkap penguasa, yaitu Golkar. Perolehan suara PDIP senantiasa dibawah 15 Persen. Pada 1999, pemilu pertama pasca otoritarisme Orde Baru, PDIP menjadi pemenang pemilu (34 persen). Bahkan, pemilu 1999 mengantarkan Megawati menjadi wakil presiden mendampingi Abdul Rahman Wahid, dan setelah Abdul Rahman Wahid dilengserkan oleh politik parlemen, Megawati kemudian menjadi presiden. Pada pemilu 2004 perolehan suara PDIP 18 persen, dan turun lagi dalam pemilu 2009 menjadi 14%.

Pada rentang waktu dua periode pemerintahan, yaitu hasil pemilu 2004 dan 2009, PDIP mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi. Rantang waktu 2004-2009 PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa pasca pemilu 2009 PDIP dan Hanura menjadi partai oposisi.

Berdasarkan hasil kongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna *Grand Bali Beach*. Pada bulan April 2010 yang lalu, Megawati Soekarnoputri kembali terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2010 – 2015.

Megawati Soekarnoputri juga kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2015 – 2020.

b. Perkembangan PDI Perjuangan di Kabupaten Kulon Progo

PDI Perjuangan di Kulon Progo adalah salah satu partai yang kuat, hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan PDI Perjuangan dalam rangka Pemilu Legislatif maupun Pilkada Kabupaten Kulon Progo. PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup kuat di Kabupaten Kulon Progo dengan 8 kursi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo dan menjadi Kepala Daerah selama empat periode berturut-turut yaitu H. Toyo Santoso Dipo selama 2 periode dan Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) yang masa jabatannya berakhir pada 26 Agustus 2016 dan maju kembali sebagai calon bupati untuk periode 2017-2022. Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) kembali terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kulon Progo pada periode 2017- 2022. Hal ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang cukup kuat di Kabupaten Kulon Progo.

Partai politik dengan semboyan “partainya wong cilik” ini tidak serta merta hanya mencalonkan kadernya saja untuk bertanding dikancah perpolitikan di Kulon Progo. Para pengurus partai ini menyaring suara dan harapan masyarakat dari berbagai kalangan yang pada akhirnya disimpulkan menjadi visi dan misi dari calon bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan. Calon yang diusung harus sesuai dan sejalan dengan apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat tadi, tidak memntingkan kepentingan pribadinya dan bekerja untuk rakyat. Maka dari itu calon – calon yang diusung oleh PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Kulon Progo terpilih sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo.

c. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Adapun visi dan misi dari PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Visi

- Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur .

2. Misi

- Membangun dan menghimpun kekuatan politik rakyat.
- Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
- Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

d. Fungsi Partai

Berdasarkan AD/ART, PDI Perjuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

e. Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas partai disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - a. Dewan pimpinan pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
 - b. Dewan pimpinan pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Partai.
 - c. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama partai.
 - d. Dewan pimpinan pusat menetapkan pedoman dan peraturan partai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Kongres.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan peraturan, keputusan, dan program partai di tingkat nasional, serta menyelenggarakan manajemen partai secara modern.
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada alat kelengkapan partai, petugas partai dalam lembaga legislative,

lembaga eksekutif dan alat kelengkapan partai lainnya di tingkat nasional.

- Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - Melaksanakan Konsolidasi organisasi dan pendidikan kader partai ditingkat pusat.
 - Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif.
- f. Anggota Dewan Pimpinan Pusat, setelah dipilih oleh kongres partai, mengucapkan sumpah/janji di dalam kongres partai.
- g. Anggota Dewan Pimpinan Pusat wajib mendahulukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus partai. Dalam hal anggota Dewan Pimpinan Pusat berkeinginan menempati jabatan lain dibidang politik, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
- h. DPP mengesahkan struktu, komposisi, dan personalia DPD dan DPC.
- i. DPP menetapkan petugas partai, yang ditugaskan di dalam lembaga-lembaga negara atau organisasi lain di tingkat nasional.
- j. DPP membentuk fraksi dan menetapkan Pengurus fraksi di DPR/MPR-RI.

2. Dewan Pimpinan daerah (DPD)

- a. DPD adalah pelaksana eksekutif partai tingkat daerah.
- b. Anggota DPD setelah dipilih dalam konferensi daerah partai mengucapkan sumpah/janji di depan konferensi daerah partai.
- c. DPD mempunyai wewenang dan kewajiban:
 1. Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan partai di wilayahnya.
 2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan supervisi terhadap DPC dan kegiatan partai di tingkat daerah.
 4. Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia DPC di wilayahnya.
 5. Melaksanakan program kerja partai di daerah.
 6. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi di DPRD Provinsi.
 7. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
 8. Memutuskan dengan persetujuan DPP partai untuk menarik kembali petugas partai di lembaga negara di daerah.

9. Menyelenggarakan konferensi daerah partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam konferensi daerah partai.
10. Menetapkan personil partai untuk bertugas, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat daerah.

3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

- a. DPC adalah pelaksana eksekutif partai tingkat cabang
- b. Anggota DPC, setelah dipilih dalam konferensi cabang partai mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan konferensi cabang partai.
- c. DPC mempunyai wewenang dan kewajiban:
 - Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan partai di wilayahnya.
 - Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 - Memimpin dan mengkoordinasikan anak cabang partai dan kegiatan partai di wilayahnya.
 - Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia pengurus partai di wilayahnya.
 - Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.
 - Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi partai di DPRD kabupaten/kota.

- 7Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- Menyelenggarakan konferensi cabang partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam konferensi cabang partai.
- Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD partai untuk menarik kembali petugas partai di lembaga negara tingkat kabupaten/kota.

4. Pengurus Anak Cabang (PAC)

- a. PAC adalah pelaksana eksekutif di tingkat kecamatan.
- b. PAC, setelah terpilih dalam Musyawarah Anak Cabang, mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan Musyawarah Anak Cabang.
- c. PAC sedikitnya 9 (Sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara.
- d. PAC yang terkena sanksi pembebasan oleh dan setelah rapat PAC dilaporkan kepada DPC untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Lowongan pengurus partai yang terjadi di PAC penggantinya diusulkan oleh DPC kepada DPD untuk mendapatkan persetujuan.

- f. PAC mempunyai wewenang sebagai berikut:
- Menumbuhkebangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayahnya.
 - Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan partai di tingkat kecamatan.
- g. Mengesahkan susunan, komposisi, dan personalia Pengurus Anak Ranting partai di wilayahnya.
- h. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.
- i. i. Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga.
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Partai dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai.

5. Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai

- a. Pengurus Ranting adalah pelaksana program partai di tingkat desa/kelurahan dan/atau yang setingkat.
- b. Pengurus Anak Ranting adalah pelaksana program partai di tingkat dusun/rukun warga/lorong/gang dan/atau sebutan lainnya.
- Pengurus Ranting setelah terpilih dalam musyawarah Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam Musyawarah Ranting Partai. Pengurus Anak Ranting Partai

- Setelah terpilih dalam rapat anggota Anak Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam rapat anggota Anak Ranting Partai.
- c. 1. Pengurus Ranting sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara.
2. Pengurus Anak Ranting sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara.
- d. Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai yang terkena sanksi pembebasan tugas dan/atau pemberhentian sementara, maka jabatan yang bersangkutan menjadi lowong dengan sendirinya.
- Kekosongan (lowongan) di dalam kepengurusan Ranting, maka pengurus Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada DPC partai melalui PAC Partai.
 - Kekosongan (kelowongan) di dalam Anak Ranting, maka Pengurus Anak Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada PAC partai melalui Pengurus Ranting Partai.
- e. Pengurus Anak Ranting mempunyai wewenang dan kewajiban:

- Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayahnya.
- Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
- Melaksanakan kegiatan partai di wilayahnya.
- Menjaga nama baik dan menegakkan disiplin partai di wilayahnya.
- Memberikan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga.
- Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Partai dan/atau rapat anggota partai untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Anak Ranting.

f. Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo

Berikut ini adalah struktur kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo periode 2015 - 2020.

Tabel 4.1 STRUKTUR KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN KULON PROGO MASA BAKTI 2015 – 2020

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	Drs. SUDARTO
2.	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BAMBANG SUMBOGO, BA
3.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi	SIGIT HARDIANTO
4	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	ARIS SYARIFUDIN
5.	Wakil Ketua Bidang komunikasi Politik	TH. TJATUR NUGROHO, SE
6..	Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan	EKA SEPTI WULANDARI
7.	Wakil Ketua Bidang Maritim	SUSILO, BA
8.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi , Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WARSONO HADI
9.	Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan	BASUKI
10.	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	SUSANA
11.	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya	PANCAR TOPO DRIYO
12.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dra. KEKSI WURYANINGSIH

13.	SEKRETARIS	ISTANA, S.H., M.I.P
14..	Wakil Sekretaris Bidang Internal	HERIYANTO
15.	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	MANUTI EKO NURKAYATUN, S.Pt
16.	BENDAHARA	AKHID NURYATI
17.	Wakil Bendahara	SUGIYANTO, ST., MM

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kab. Kulon Progo

Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan PAC Di Kecamatan Wates

NO	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	AJI PANGARIBAWA
2.	Wakil Ketua	HERMAN
3.	Wakil Ketua	SUMARDIYONO
4.	Wakil Ketua	UNTUNG SUPRIYANTO
5.	Wakil Ketua	SUYANTO
6.	Wakil Ketua	DJUMINGAN
7.	Wakil Ketua	PAIDI
8.	SEKRETARIS	WALJONO
9.	Wakil Sekretaris	KIKI REJEKI, SH
10.	BENDAHARA	KRISTANTRI WAHYUNI
11.	Wakil Bendahara	AGUNG SETYA BUDI

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kab. Kulon Progo